

MENGURAI KOMPLEKSITAS MASYARAKAT DI MASA PANDEMI: LABIRIN MENUJU PENDEKATAN SISTEMIK PERSPEKTIF SISTEM SOSIAL LUHMANN

UI Ardaninggar Luhtitianti^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*e-mail: ui.luhtitianti@uin-suka.ac.id

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk mengelaborasi problem kompleksitas sosial pada berbagai institusi di Indonesia dalam menghadapi pandemi dengan menggunakan teori Sistem Sosial Luhmann. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun (2020-2022) institusi sosial-ekonomi dan kesehatan mengalami kegoncangan sistem dan bahkan pada titik tertentu berada pada taraf chaos. Kebijakan yang kurang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah juga telah menjadi salah satu penyebabnya. Pada sisi lain, muncul ketidakpatuhan pada sebagian besar masyarakat terhadap anjuran physical distancing, sehingga memunculkan kompleksitas tersendiri. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi virtual, studi literatur tentang teori Sistem Sosial Luhmann, dan penelusuran penelitian terdahulu tentang pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional pada masing-masing sistem telah menghasilkan perbedaan makna pandemi pada masing-masing institusi. Perbedaan makna ini memunculkan umpan-balik berupa variasi kebijakan pada masing-masing institusi, khususnya ekonomi dan kesehatan. Hal tersebut nampak di permukaan sebagai wujud dari ketidaksinkronan kebijakan antar institusi. Melalui pendekatan Sistem Sosial Luhmann, problem kompleksitas memungkinkan untuk dapat diurai dari akarnya, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu rekomendasi intervensi kebijakan bagi setiap sistem ketika ke depan menghadapi situasi yang sama seperti pandemi.

Kata kunci: Sistem Sosial; Pandemi; Kebijakan; Kompleksitas Masyarakat

Abstract

This article intends to elaborate on the problem of social complexity in various institutions in Indonesia in dealing with the pandemic by using Luhmann's Social System theory. During two years (2020-2022), socio-economic and health institutions experienced system shocks and, even at a certain point, were at the level of chaos. The lack of synchronic policies between the central and local governments has also been one of the causes. On the other hand, most people do not comply with the recommendations for physical distancing, which creates complexities. This article is based on qualitative-descriptive research. Data collection techniques were carried out through virtual observations, literature studies on Luhmann's Social System theory, and tracing previous research on pandemics. The results show that functional differentiation in each system has resulted in different meanings of the pandemic in each institution. This difference in meaning gives rise to feedback in the form of policy variations in each institution, especially the economy and health. It appears on the surface as a manifestation of the incompatibility of policies between institutions. Through Luhmann's Social System approach, it is possible to solve the problem of complexity from its roots so that the results can be used as one of the recommendations for policy interventions for each system when facing a similar situation in the future, such as a pandemic.

Keywords: Social System; Pandemic; Policy; The Complexity of Society

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



PENDAHULUAN

April 2020, ketika angka pasien positif Covid-19 semakin naik, pasar Kotagede Yogyakarta tetap terlihat ramai. Sepanjang jalan Karanglo masih seperti biasanya, padat. Terutama hari Legi, Kotagede di pagi hari adalah saat dimana para pedagang dan penjual bertransaksi dengan berbagai jenis unggas. Di samping itu, antrian kendaraan campur-aduk mengular beberapa ratus meter dari arah selatan, timur dan utara. Diantara riuhnya para pedagang, baliho super besar di tengah pertigaan pasar tersebut memperlihatkan anjuran untuk *social distancing* dan informasi kewajiban bagi semua warga untuk memakai masker. Fenomena ini adalah distingsi besar, sebuah ironi anjuran Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kenyataan yang tidak seperti harapan pada para pedagang dan pengunjung pasar. Orang-orang tetap terlihat lalu-lalang, polisi berpakaian lengkap dengan masker mengatur kendaraan di bawah baliho itu, seolah tidak ada baliho tersebut di belakang mereka.

Fenomena ini juga menyiratkan paradoks yang besar antara ranah kebijakan formal dengan kenyataan perilaku sosial warga. Sehingga mengesankan berbagai kegiatan masyarakat yang sebetulnya diarahkan untuk mencegah persebaran Covid-19 menjadi sebatas formalitas. Interaksi sosial ekonomi masyarakat masih berlangsung dengan bebas, meskipun terdapat kebijakan beberapa pertemuan warga diminimalkan. Bahkan, di masa ketika New Normal diberlakukan, dan kurva positif Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai ditambah tempat ibadah telah dibuka kembali dengan sejumlah aturan protokol kesehatan. Demikian pula dengan beberapa tempat pariwisata dan sektor ekonomi di Kotagede dan sejumlah tempat lainnya.

Fakta sosial perilaku masyarakat di Kotagede di masa pandemi yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah

tersebut, jamak terjadi di berbagai tempat. Seperti yang ditunjukkan dalam banyak penelitian tentang perilaku masyarakat Indonesia di masa pandemi yang kurang patuh pada *physical distancing* (Agung, 2020; Fadhillah Rizqah & Amelia, 2021; Lesilolo, 2021; Wanodyatama Islami et al., 2021), berkerumun, melakukan berbagai kegiatan sosial keagamaan di masyarakat dan tempat ibadah (Amin et al., 2021; Nurrahmi et al., 2021; Sumaryana et al., 2020), dan sebagainya. Situasi ini semakin kompleks ketika muncul ketidaksinkronan kebijakan dari berbagai institusi seperti Gubernur dan walikota, serta sektor kesehatan (Ridhoi, 2020). Selama 2 tahun pandemi, berbagai studi akademis telah mengkritik kebijakan penanganan pandemi di Indonesia yang kurang efektif dalam menangani persebaran virus Covid-19 (Fealy, 2020; Lele, 2021) .

Beberapa penelitian sebelumnya tentang perilaku masyarakat Indonesia di masa pandemi menyiratkan bahwa problem kurang efektifnya kebijakan pemerintah tersebut salah satunya disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berinteraksi di luar rumah (Dede Yoshima Nekada et al., 2020; Peter Garlans Sina, 2020; Prasetya & Hidayat, 2020). Penelitian lain menyebutkan faktor budaya masyarakat Indonesia yang menyenangi kebersamaan dalam berbagai kegiatan sosial sebagai akar problemnya (Dharma Kusuma, 2021; Nurchahyati & Fauzi, 2021), sehingga membatasi pertemuan adalah perkara yang sulit bagi masyarakat, khususnya di area pedesaan dan sub urban. Sejumlah penelitian tersebut telah mencoba menjawab apa penyebab empiris kompleksitas masyarakat di masa pandemi. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengungkap penyebab kompleksitas dari aspek mikro, yakni perilaku sosial individu yang menyimpang dari protokol kesehatan serta *impact* lain yang muncul dari kebutuhan mendesak di

sektor ekonomi. Belum banyak yang membahas bagaimana Sosiologi yang memiliki berbagai macam pendekatan dan teori digunakan untuk membaca dan memahami gejala, perilaku, dan berbagai kompleksitas masyarakat di masa pandemi, khususnya dengan menggunakan pendekatan Sistem Sosial Luhmann.

Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan penjelasan (logika, *reasoning*) secara teoritik berkenaan dengan fenomena paradoks perilaku masyarakat Indonesia di masa pandemi, kemudian 'menariknya ke atas' untuk memberikan penjelasan secara general terhadap berbagai gejala sosial serupa di daerah lain di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting bagi kajian ilmu Sosial sebab melalui pendekatan Sistem Sosial Luhmann kita dapat mengetahui bahwa proses penerimaan suatu sistem dan institusi tertentu terhadap pandemi akan mempengaruhi sistem/institusi yang lain. Sehingga muncul fenomena yang sering disebut sebagai 'ketidakpatuhan warga', ambruknya sistem ekonomi, dan *chaosnya* sistem kesehatan di masa pandemi. Sehingga, hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagaimana Sosiolog dan pengambil kebijakan dapat menggunakan intervensi yang tepat dalam mendekati masyarakat.

METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dalam konteks penelitian ini adalah studi literatur dan penelusuran data di internet sebagai data pendukung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder tentang dinamika pandemi dan kebijakan pandemi selama kurun waktu di tahun 2020-2022. Adapun data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui observasi virtual dan penelusuran artikel hasil penelitian dalam 10 tahun terakhir.

Observasi virtual dilakukan dengan pencarian keywords tertentu pada berita-berita di internet, yang meliputi pandemi, sistem sosial, kebijakan pandemi, dan teori Luhmann. Sedangkan data penelitian terdahulu dilakukan dengan menyortir artikel dengan topik-topik sejenis dan buku referensi tentang Teori Sistem Sosial Luhmann. Data penelitian ini dikategorisakan ke dalam 3 topik utama, yaitu: perilaku masyarakat di masa pandemi di berbagai daerah di Indonesia dari tahun 2020-2022, kebijakan pandemi di Indonesia 2020-2022, dan teori Sistem Sosial Luhmann.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan proses analisis data dengan menggunakan teknik coding manual. Proses coding ini difokuskan dengan melihat pada tujuan penelitian (aspek kebijakan, kritik kebijakan, dampak, dan perilaku sosial di masa pandemi) dan hasil penelitian masing-masing artikel. Sedangkan untuk kategori literatur teori Sistem Sosial Luhmann, dicoding berdasarkan penerapan teori pada suatu kasus sosial tertentu dan hasil dari penerapan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Masyarakat Dalam Perspektif Teori Sistem Sosial Luhmann

Sebagai sebuah teori yang lahir dari inspirasi fisika dan biologi, teori Sistem secara umum menganalogikan masyarakat sebagai suatu organisme sosial yang memiliki seperangkat system, aturan, elemen penyusun, dan hukum-hukum yang memungkinkan kesemuanya ini saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan pada akhirnya membentuk sub sistem baru sebagai respon dari lingkungan (Luhmann, 2012). Teori ini membedakan antara system itu sebagai bagian yang terpisah dengan lingkungannya (Li, 2017). Misalnya, fisik tubuh kita terdiri dari berbagai elemen, seperti syaraf, otak, pencernaan, dan sebagainya, kesemuanya ini disebut sebagai system. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar tubuh kita,

baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, seperti udara, situasi sosial, dan sebagainya. Demikian pula perbedaan system sosial di masyarakat dengan lingkungan.

Sistem disini mencakup apapun, segment apapun, dan dapat diterapkan dari level individu (mikro), meso hingga makro. Misalnya negara, organisasi sosial, institusi birokrasi, perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya. Ketika kita melihat institusi birokrasi sebagai sebuah system, maka apapun yang berada di luar institusi birokrasi dikategorikan sebagai lingkungan, baik itu individu, kebijakan fiscal negara, dinamika politik, kesehatan masyarakat, dan hal-hal lain yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi institusi birokrasi tersebut.

Meskipun teori ini secara umum merupakan turunan dari *hard science*, namun Water Buckley dalam *Sociology and Modern System Theory* menjelaskan bahwa teori ini dapat diaplikasikan dalam ilmu sosial dan *behavioral* (Ritzer, 2004; Ritzer & Stepnisky, 2011). Dilihat dari historitasnya, teori ini merupakan kritik dari teori fungsionalisme-struktural Talcott Parson, yang menjadikan titik keseimbangan (*equilibrium*) sebagai tujuan utama diantara hubungan di dalam sebuah system. Pokok penting dari teori Sistem Sosial Luhmann ini adalah pada proses yang terdapat dalam hubungan-hubungan yang ada dalam system tersebut, khususnya dalam hal ini adalah jaringan komunikasi dan informasi yang terletak pada umpan balik (*feedback*)/respon atas situasi eksternal dari system tersebut (lingkungan) (Ritzer, 2004).

Feedback adalah aspek esensial dalam teori system. Melalui *feedback* ini memungkinkan system untuk dapat menangani friksi, pertumbuhan, evolusi, dan perubahan mendadak (Valentinov, 2017). Kata kunci dari mekanisme *feedback* ini menurut Buckley adalah *self-consciousness* (kesadaran diri) (Ritzer & Stepnisky, 2011), yang pada tahap selanjutnya ini nanti akan mendapatkan porsi penjelasan lebih lanjut di

point komunikasi sebagai elemen dasar teori Sistem Luhmann.

Situasi sosial masyarakat yang terjadi di Kotagede dan sejumlah daerah lain di masa pandemi ini merupakan bagian dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia, terutama ketika ingin keluar dari masalah pandemi. Berbagai analisis dari pakar kesehatan, pengamat sosial, dan akademisi lainnya nampaknya perlu untuk dilengkapi dengan pembahasan mendetail tentang bagaimana system sosial dalam masyarakat tersebut bekerja dalam menanggapi atau merespon situasi eksternal seperti pandemi. Tidak untuk menjustifikasi bahwa perspektif ini adalah yang paling tepat, tetapi untuk membangun argument bahwa dalam melihat suatu masyarakat kita tidak bisa menganalisisnya secara parsial dari sisi kesehatan atau ekonomi saja misalnya. Akan tetapi mengamati secara utuh masyarakat sebagai suatu system sosial yang memiliki elemen dan saling terkait satu sama lain. Pendekatan Luhmann ini lebih cenderung disimpulkan sebagai pendekatan interdisipliner.

Salah satu aspek mendasar dari Teori Sistem Luhmann adalah, bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk 'mengatur dan membentuk dirinya sendiri'. Konsepnya ini dikenal dengan istilah *autopoiesis*. *Autopoiesis* ini mengandaikan masyarakat sebagai satu kesatuan utuh yang memiliki sifat dapat 'mengorganisasikan dirinya sendiri' (Seidl & Schoeneborn, 2012). Maksudnya adalah, bahwa masyarakat sebagai sebuah jaringan dari berbagai macam system yang saling terkait melalui interaksi didalamnya. Dalam proses interaksi tersebut terdapat perubahan-perubahan yang memungkinkan system tersebut untuk terus memproduksi subsistem (komponen) dari dirinya sendiri (Luhmann, 2012). Hal inilah yang kemudian disebut Luhmann sebagai kompleksitas sosial. Komponen-komponen yang diciptakan oleh system ini berfungsi sebagai pertahanan diri dari berbagai perubahan di

luar system tersebut, sehingga memungkinkannya untuk tidak mudah ambruk meskipun terdapat konflik di dalamnya (Valentinov, 2014).

Kompleksitas ini pada akhirnya menuntut adanya pemilahan agar supaya dapat dimengerti, yang pada tahapan selanjutnya akan memunculkan reduksi pembedaan system di satu sisi, dan lingkungan di sisi lain. Menurut Luhmann, pembedaan ini menjadi penting karena jika suatu system sosial tidak dibedakan dari lingkungannya, maka akan menimbulkan *chaos* (Valentinov, 2017). Sistem sosial masyarakat tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, malah justru akan menjadi patologi bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya, akan memunculkan ketidakmampuan untuk bertahan dari situasi eksternal yang mengganggu, baik itu ancaman ekonomi, bencana, problem kesehatan, dan sebagainya.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami kompleksitas ini, kita ambil contoh system psikis manusia dan lingkungan dimana manusia tersebut berada. Sistem psikis manusia terdiri dari akal, qalbu, dan lain-lain, yang masing-masing saling berkaitan (kompleks) dan memiliki fungsinya masing-masing. Ketika terjadi gangguan dari eksternal (lingkungan), misalnya problem tekanan sosial, tekanan pekerjaan, dan sebagainya, maka hal itu akan mempengaruhi psikis individu tersebut. Pada akhirnya, karena system psikis terganggu maka ia tidak dapat melakukan berbagai perannya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat di lingkungannya. Disinilah letak fungsi reduksi pembedaan tersebut, sehingga dapat mengurai kompleksitas system psikis manusia.

Dalam konteks masyarakat, reduksi pembedaan ini juga dapat memberikan kesempatan kepada system sosial masyarakat untuk melakukan pembenahan internalnya sendiri (Ritzer, 2004). Sehingga memungkinkan system yang tadinya mengalami kekacauan, menjadi lebih

tertata. Ada satu hal lain yang menarik dari teori ini, yakni ketika dalam proses reduksi tersebut kita tidak hati-hati dalam mengambil berbagai kemungkinan atas pembedaan-pembedaan system terhadap lingkungan, maka akan memunculkan resiko yang dapat menghancurkan system itu sendiri (Holmström, 2007).

Ketika autopoiesis di atas digunakan dalam penerapan terhadap fenomena sosial, maka tentu dalam menganalisisnya kita harus membawa elemen-elemen penyusun realitas sosial manusia yang tentu berbeda dengan realitas nonmanusia. Elemen-elemen pembentuk system sosial yang dimaksud oleh Luhmann tersebut adalah jaringan komunikasi yang terbentuk karena faktor *self-consciousness*.

Self-consciousness, Jaringan Komunikasi, dan Meanings

Di atas telah dijelaskan, Luhmann berargumentasi bahwa elemen mendasar dari masyarakat adalah komunikasi. Faktanya, bukankah itu adalah keseharian kita dan seringkali proses komunikasi tersebut menghasilkan makna-makna yang terus-menerus direproduksi oleh sistem. Menurut Luhmann, komunikasi ini tidak akan terbangun tanpa adanya peran sistem psikis individu, yang telah kita sebut di atas sebagai *self-consciousness* (kesadaran diri) (Guy, 2018). Menariknya, *self-consciousness* ini bukanlah bagian dari masyarakat, ia merupakan bagian dari lingkungan yang memiliki sistem sendiri (sistem psikis). Sehingga dengan demikian, sistem psikis (*self-consciousness*) ini juga memiliki sifat autopoietic (Seidl & Schoeneborn, 2012).

Sistem psikis manusia dan masyarakat memiliki *property* yang sama, yakni *meaning* (makna) (Maurer, 2010). Makna terkait erat dengan pilihan yang diputuskan oleh sistem. Dan setiap makna yang lahir dari proses komunikasi akan menghasilkan kontingensi (ketidakpastian), yang pada tahapan selanjutnya kontingensi ini memunculkan *risk* (resiko) (Holmström, 2007). Sesuatu akan menjadi bermakna

ketika ada ada kemungkinan lain dari berbagai pilihan yang ada (Ritzer, 2004). Contoh, tindakan individu dinilai tidak bermakna jika tidak memiliki pembanding, misalnya ketika kita memilih jenis lipstik tertentu akan membentuk/menjadi makna hanya karena kita dapat memilih diantara berbagai pilihan lipstik yang ada.

Makna dari proses komunikasi dalam sistem terus direproduksi dan bersifat tertutup (Holmström, 2007; Maurer, 2010; Seidl & Schoeneborn, 2012). Makna ini membentuk batas-batas untuk masing-masing sistem. Contoh, dalam sistem sosial, sesuatu yang dianggap tidak bermakna akan dilihat sebagai lingkungan dan penyebab dari tindakan yang dipilih oleh sistem tersebut. Sebaliknya, apa yang bermakna di dalam sistem, akan dianggap sebagai 'motivasi' dalam tindakan yang diambil oleh sistem.

Salah satu problem lain dalam sistem sosial adalah kenyataan bahwa komunikasi dapat menimbulkan kontingensi ganda (Holmström, 2007). Hal ini terjadi karena dalam setiap proses komunikasi seringkali memunculkan makna baru diantara dua pihak komunikator dan penerima, yang biasanya mustahil penerima akan memahami dengan sempurna apa yang disampaikan oleh komunikator.

Mari kita ambil contoh bentuk komunikasi dua orang dosen di institusi PT dalam konteks peran mereka sebagai dosen, bukan sebagai teman. Ketika dalam sebuah rapat seseorang memberikan arahan dengan bahasa resmi, kemudian dijawab dengan menggunakan kata, "yoh!" maka hal ini akan menimbulkan makna yang berbeda. Pemimpin rapat mungkin akan menganggap dosen tersebut tidak punya sopan santun. Tetapi, kemungkinan lain kata "yoh!" tersebut akan dianggap sebagai bentuk 'gaya komunikasi yang santai atau informal' bagi yang mengucapkan. Proses komunikasi dua dosen dalam rapat tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kontingensi ganda. Dari sini dapat kita pahami bahwa semakin sedikit 'ruang' yang kita ketahui

tentang ekspektasi oranglain, maka akan semakin besar problem kontingensi gandanya.

Akan tetapi, mengetahui ekspektasi orang lain akan suatu tindakan tertentu adalah perkara yang hampir mustahil. Komunikasi dua dosen di atas bisa menjadi problematika konflik interpersonal, yang satu menganggap *baperan*, satunya lagi menganggap tidak sopan. Karena setiap sistem memiliki sifat autopoietic dan komunikasi menciptakan kontingensi maka sistem 'melahirkan' subsistem baru mereproduksi struktur sosial baru untuk mengatasinya. Dalam konteks contoh di atas, problem kontingensi ganda dapat diatasi melalui seperangkat norma, dimana komunikasi dua dosen tersebut di atas akan selesai ketika mengacu kepada tradisi dalam institusi. Struktur sosial berkembang untuk menjadikan komunikasi yang *improbable* menjadi lebih *probable* (Ritzer, 2004). Kita dapat bertindak sesuai apa yang menjadi pemahaman bersama dalam sebuah institusi (norma, aturan, hukum, tradisi, dan sejenisnya).

Evolusi dan Diferensiasi Sistem Sosial

Luhman berargumentasi bahwa sistem sosial tidak akan dapat eksis tanpa adanya kelanjutan komunikasi yang merupakan akibat dari tidak teratasinya kontingensi ganda (Holmström, 2007; Maurer, 2010). Oleh karenanya, ia mengajukan tesis mengenai evolusi sistem sosial yang menurutnya dapat memungkinkan komunikasi yang tidak mungkin, evolusi akan membuat kemustahilan menjadi mungkin. Bagi Luhman, evolusi sistem sosial dapat dilalui melalui berbagai jalan atau variasi. Menurut Ritzer, inilah membedakannya dengan evolusi universal dari Parsons.

Ada tiga fungsi dari seperangkat proses evolusi sistem sosial, yakni: variasi, seleksi, dan stabilisasi. Variasi merupakan proses *trial and error* (Ritzer, 2004). Maksud dari fungsi evolusi sebagai variasi adalah ketika suatu sistem sosial mengalami

konflik, gangguan, *chaos* dari lingkungan eksternal, maka suatu variasi solusi mungkin akan berkembang untuk menanganinya (Ritzer, 2004; Ritzer & Stepnisky, 2011). Setiap proses variasi ini memungkinkan terjadinya dua hal: berhasil dan tidak berhasil. Sedangkan seleksi mengacu kepada pemilihan dari berbagai variasi solusi, yang tidak selalu mencerminkan bahwa pilihan atas seleksi variasi solusi tersebut adalah yang terbaik (Thornhill, 2010). Bisa jadi sistem sosial memilih solusi tertentu atas dasar pertimbangan kemudahan atau kemungkinan yang paling rasional untuk mencapai stabilisasi struktur sosial agar lebih bertahan lama (Thornhill, 2010). Pilihan atas solusi tertentu ini juga tidak selalu diikuti dengan lenyapnya solusi yang lain.

Disebabkan oleh sistem sosial yang selalu mencari variasi solusi, seleksi dalam rangka stabilisasi inilah maka menimbulkan ciri lain dari masyarakat modern, yakni terjadinya proses diferensiasi sistem sebagai cara untuk menghadapi kompleksitas lingkungan (Valentinov, 2019). Kita ambil contoh institusi perguruan tinggi misalnya, PTN UIN Sunan Kalijaga menganggap PTKIN lain sebagai sistem lain (lingkungan), demikian pula sebaliknya. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) yang merupakan bagian dari PTKIN UIN Sunan Kalijaga (sub sistem) juga melihat PTKIN lain sebagai sistem lain. Meski demikian, FISHUM dapat melihat Fakultas lain sebagai subsistem lain dan karena itu menjadi bagian dari lingkungannya. Sehingga, hal ini memungkinkan masing-masing subsistem (Fakultas-Fakultas) mempunyai pandangan yang berbeda tentang lingkungan internal dalam sistem (PTKIN UIN Sunan Kalijaga). Pada tahap selanjutnya, hal ini menciptakan lingkungan internal yang sangat kompleks dan dinamis.

Sehingga, diferensiasi di dalam sistem adalah suatu cara penanganan ketika terjadi perubahan dalam lingkungan.

Sebab, jika sistem tidak cukup mampu merespon hal-hal yang dianggap sebagai masalah dalam lingkungan, maka sistem akan dikuasai oleh kompleksitas lingkungannya, collapse, dan berhenti eksis (Holmström, 2007). Oleh karena itu, variasi subsistem dapat dibutuhkan untuk bertahan menghadapi variasi lingkungan. Meskipun, proses diferensiasi ini pada satu sisi akan mengakibatkan meningkatnya kompleksitas sistem, yang disebabkan setiap subsistem memunculkan fungsi yang berbeda-beda (Valentinov, 2019)

Pembedaan dan proses autopoiesis ini kemudian memunculkan jenis-jenis diferensiasi. Proses ini merupakan proses seleksi variasi. Semakin banyaknya variasi yang dihasilkan oleh diferensiasi akan menghasilkan respon yang baik terhadap lingkungan dan mempercepat perubahan. Luhmann membedakan bentuk-bentuk diferensiasi, diantaranya adalah sebagai berikut (Ritzer, 2004):

1) Segmentary Differentiation

Diferensiasi ini merupakan proses dimana sistem membagi-bagi dirinya menjadi banyak bagian yang masing-masing digunakan untuk memenuhi fungsi-fungsi yang identik secara terus-menerus. Misalnya, setiap pabrik tekstil memiliki fungsi yang sama dengan pabrik tekstil yang lain. Mereka sama-sama memproduksi kain, diproduksi dengan mekanisme yang sama, dan diorganisasikan dengan cara yang sama.

2) Diferensiasi Stratifikasi.

Ini merupakan jenis diferensiasi yang bersifat hierarki. Setiap urutan hierarki memiliki fungsi khusus di dalam sistem. Setiap hierarki memiliki hierarki kewenangannya. Ritzer (2004) menambahkan, bahwa adanya diferensiasi stratifikasi ini menyebabkan jajaran paling bawah menjadi sulit untuk menjadi subjek komunikasi influensial. Hal ini kemudian menciptakan problem structural yang membatasi kompleksitas sistem. Ketika jajaran paling bawah semakin jauh dari yang mengarahkan

sistem, maka fungsi cenderung kurang berjalan sesuai yang diharapkan.

- 3) Diferensiasi Pusat-Pinggiran
Ini berkaitan dengan Diferensiasi Stratifikasi dan Segmentary Differentiation (Luhmann, 2012). Misalnya, pabrik sepatu Nike ada di berbagai negara, namun demikian pusatnya tetap di USA, berkuasa dan memiliki kontrol.
- 4) Diferensiasi Sistem Fungsional
Ini adalah bentuk diferensiasi paling kompleks dan mendominasi masyarakat modern. Diferensiasi ini berkaitan dengan fungsi dari setiap subsistem atau unit yang ada dalam suatu sistem. Ketika fungsi ini gagal, maka seluruh sistem akan mengalami kendala besar dalam bertahan, dan setiap subsistem atau unit yang berbeda memiliki derajat independensi, meskipun seringnya campuran kompleks dari interdependensi dan independensi (Ritzer, 2004).

Ketika satu subsistem atau satu segment gagal dalam menjalankan fungsinya, hal itu akan mengganggu subsistem lainnya, bahkan bisa mengakibatkan resiko keruntuhan sistem. Luhmann memberikan penjelasan bahwa problem dalam diferensiasi fungsional adalah tidak semua kebutuhan dalam masyarakat tertangani oleh sistem fungsional apapun (Luhmann, 2012). Misalnya, Luhmann mencontohkan bagaimana sistem ekonomi tidak sepenuhnya merepresentasikan problem ekologis, sebab polusi yang disebabkan oleh sistem ekonomi adalah rasional. Ini juga akan bersinggungan dengan sistem hukum. Meskipun sistem hukum mengeluarkan undang-undang tentang batas pencemaran udara, namun ini dapat saja menimbulkan problem lain ketika industry-indusri menaikkan cerobong asapnya lebih tinggi sehingga efek polusi menyebar ke daerah lain di luar batas wilayah yang sudah ditetapkan. Tentu hal ini bertentangan dengan maksud dari undang-

undang tersebut, namun hukum tidak dapat melampaui kewenangan diluar undang-undang yang tertulis.

Dalam problem diferensiasi sosial, Luhmann mengemukakan pentingnya kode pada semua sistem maupun subsistem. Kode ini berfungsi untuk membedakan elemen-elemen sistem dari elemen-elemen yang tidak termasuk sistem (Leydesdorff, 2018). Misalnya, sistem ekonomi kodenya untung vs rugi. Problem ketidakpahaman terhadap kode, misalnya jika Menteri Lingkungan Hidup mendiskusikan masalah ekologi dan fakta perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengakibatkan kerusakan sistem lingkungan, maka mungkin ini akan menjadi buntu ketika berhadapan dengan sistem ekonomi karena masing-masing memiliki kode yang berbeda. Ini dalam teori Luhmann, bisa disebut sebagai hubungan independensi, dimana masing-masing sistem memiliki fungsinya sendiri-sendiri (Leydesdorff, 2018). Namun, hubungan antar sistem bisa juga bersifat interdependent, yang menimbulkan resiko-resiko tak terduga lain sebagai hasil reaksi dari problem tertentu di masyarakat (Ritzer, 2004). Misalnya, Luhmann mencontohkan, tuntutan terhadap industry transportasi yang lebih ramah lingkungan mungkin akan membuat sebagian besar industry mobil beralih ke mobil atau motor listrik karena dilihat dapat memberi segment pasar tersendiri yang itu menguntungkan buat industry tersebut (Ritzer, 2004). Namun, karena lebih murah dan dilakukan dengan sistem kredit, maka setiap orang bisa jadi akan dengann mudah membeli mobil. Pada tahap selanjutnya, akan menimbulkan problem transportasi dan tata kota yang lebih berat.

Teori Sistem Sosial Luhmann Untuk Mengurai Kompleksitas Perilaku Masyarakat dan Institusi Sosial di Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Untuk dapat menerapkan Teori Sistem Luhmann dalam konteks Covid-19

dan masyarakat Indonesia, penulis akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Sebagaimana Luhmann menjelaskan ciri-ciri sistem di atas, maka masyarakat Indonesia adalah sistem sosial itu sendiri. Penulis tidak menspesifikasikan sistem yang akan dibahas disini, tetapi sekup yang dibahas adalah sistem sosial sebagai wilayah makro, dimana di dalamnya terdapat sistem ekonomi, sistem kesehatan, sistem politik, dan sistem pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah pandemi Covid-19. Fokus dari analisis disini adalah menggunakan teori sistem sosial untuk mengurai kompleksitas kebijakan dan perilaku masyarakat Indonesia dalam situasi pandemi. Secara general, di level yang lebih makro sistem sosial masyarakat bertahan dengan memproduksi subsistem-subsistem lain untuk merespon kebutuhan lingkungan. Seperti misalnya terdapat sub sistem ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan agama. Mengacu kepada teori Luhmann, subsistem ini dapat menjadi lingkungan bagi sistem sosial masyarakat, demikian pula sebaliknya. Hubungan di antara berbagai subsistem dapat menjadi *dependent* maupun *interdependent*. Subsistem ini pada sisi lain menjadi lingkungan bagi subsistem yang lain.

Autopoiesis

Sistem sosial yang autopoiesis ketika menghadapi masalah kesehatan berupa pandemi, akan merespon dan mereproduksi unit-unit tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, sistem yang paling cepat bereaksi adalah sistem kesehatan dan sistem ekonomi. Kesehatan sebagai sistem sekaligus subsistem dari sistem sosial akan membentuk unit-unit khusus (mereproduksi diri) dengan membentuk Satgas Covid-19, melakukan serangkaian sosialisasi bagaimana bentuk-bentuk pencegahan pandemi, menganjurkan berbagai tawaran kebijakan untuk sistem institusi politik kenegaraan, dan sebagainya. Demikian pula sistem ekonomi seperti pusat-pusat

perbelanjaan, secara otomatis akan menyesuaikan diri. Semua proses tersebut merupakan bentuk autopoiesis yang ditujukan dalam kerangka bertahan dari situasi eksternal pandemi yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan seluruh sistem kehidupan.

Dalam konteks Indonesia, proses autopoiesis ini seringkali menimbulkan paradoks antar sistem, dimana masing-masing seperti yang digambarkan di bab pendahuluan memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam upaya mengatasi pandemi. Ketidaksinkronan ini pada akhirnya menyebabkan lamanya waktu dalam mengatasi pandemi. Indonesia membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menurunkan angka pasien Covid-19. Kondisi ini juga diperparah dengan sistem budaya khususnya perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang belum dapat beradaptasi secara total dengan berbagai kebijakan yang ada. Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dalam Teori Sistem Sosial Luhmann, kita akan mencoba mengurai satu-satu problem tersebut.

Respon, Risk, dan Kontingensi Ganda

Respon adalah aspek terpenting dalam menanggapi situasi eksternal lingkungan. Ia juga bergantung kepada bagaimana kepekaan sistem terhadap masalah. Aspek inilah yang menjadi problem mendasar pertama Indonesia saat merespon pandemi. Komunikasi yang dipertunjukkan oleh pemerintah pusat sebagai hierarki tertinggi dalam diferensiasi sistem politik belum sampai kepada kebijakan komprehensif yang cepat. Luhmann mengingatkan bagaimana respon sistem dalam melakukan autopoiesis sangat mempengaruhi seperti apa sistem tersebut akan bertahan dari berbagai macam gangguan. Ketika angka positif Covid-19 masuk di angka 2 orang di Provinsi DKI Jakarta, problem diferensiasi pada level pusat-pinggiran nampaknya menjadi awal mula paradoks penanganan pandemi di Indonesia.

Hal ini bisa kita lihat misalnya bagaimana Pemerintah Pusat memiliki kebijakan yang lebih longgar dan normatif (Riana, 2021), sedangkan di tataran propinsi pemerintah daerah merespon dengan kebijakan yang lebih ketat (Azhari, 2020). Di luar persoalan politik, secara institusional terdapat problem dalam proses komunikasi antara pusat dengan daerah (pinggiran). Terciptanya diferensiasi pusat-pinggiran pada sisi lain memperbesar kompleksitas fungsi dari masing-masing subsistem. Di samping itu, ketika proses komunikasi kelembagaan yang berjalan di masing-masing sub sistem tidak menghasilkan makna yang sama bagi kedua belah pihak, maka resikonya (*risk*) adalah munculnya kontingensi ganda. Pemerintah Pusat merasa sebagai pusat sistem yang memiliki kewenangan penuh atas kebijakan pandemi di Indonesia, sehingga wajar jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement agar seluruh Pemerintah Daerah mengikuti kebijakan Presiden (Purnamasari, 2020). Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki makna sendiri dalam merespon pandemi di daerahnya, sehingga kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta sangat berkebalikan dengan kebijakan presiden.

Munculnya kontingensi ganda tersebut di atas, menimbulkan *risk* berupa paradoks kebijakan yang pada akhirnya semakin memperumit kondisi dan perilaku masyarakat dalam merespon kebijakan. Kita harus mengingat teori Luhmann bahwa individu dalam masyarakat merupakan lingkungan eksternal sekaligus bagian dari sistem yang memiliki kemampuan autopoiesis sendiri-sendiri dalam menanggapi pandemi dan kebijakan pemerintah. Contoh empiric yang paling mencolok adalah perilaku ganda masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi, di satu sisi memaknainya sebagai problem yang harus disikapi dengan menonaktifkan semua aktivitas di luar rumah, dan di sisi lain terdapat sejumlah perilaku masyarakat yang dapat keluar masuk propinsi melalui bandara, terminal

dan stasiun. Kebijakan lockdown dari Pemerintah DKI Jakarta pada akhirnya ketika tidak diikuti dengan pemaknaan yang sama dalam merespon pandemi oleh sistem-sistem lain, akan menjadi tidak efektif di masyarakat.

Tidak sebagaimana di negara-negara lain yang mengambil langkah cepat dengan melockdown sejumlah daerah bahkan total seluruh negara, problem kontingensi ganda dan diferensiasi fungsional pusat-pinggiran pada sistem sosial masyarakat Indonesia tidak mampu merespon dengan sama seperti negara lain. Akibatnya, lockdown hanya bersifat particular, sehingga secara teknis tidak mampu mengontrol mobilitas warga antar propinsi. Hal ini terlihat ketika di awal pandemi, DKI Jakarta menerapkan lockdown, tetapi kebijakan ini justru menimbulkan problem baru bagi propinsi lain seperti DIY. Ketidaksiapan sistem ekonomi untuk merespon kebijakan lockdown dari pemerintah memunculkan sejumlah masalah seperti 'migrasi' penduduk DKI yang kehilangan mata pencaharian ke sejumlah kota dan propinsi lain di Indonesia. Tentu saja konsekuensinya adalah menambah peluang tersebarnya virus, dan di sisi lain menciptakan konflik laten pendatang dan pemangku masyarakat di daerah lain.

Hal ini juga terlihat di beberapa propinsi lain yang mulai melonjak angka positif penderita Covid-19. Sejumlah kebijakan dari pemerintah daerah tampaknya tidak bisa dilakukan sama seperti respon yang ada di pusat. Bahkan hingga tingkat lokal seperti Jabar dan DKI, sejumlah warga merespon dengan menciptakan sejumlah kebijakan sendiri, menutup akses keluar masuk daerah, membuat komunitas untuk mengatasi akibat dampak ekonomi, dan sebagainya. Keseluruhan proses ini disebut sebagai proses autopoiesis. Setiap sistem merespon dengan makna yang didapat masing-masing, sebagai hasil dari jaringan komunikasi antar sistem dan subsistem.

Masalahnya, proses *autopoiesis* dalam konteks menanggapi pandemi pada masing-masing sistem tidak bisa berlangsung dalam waktu yang sama, dan tidak memiliki respon yang sama. Hal ini disebabkan karena problem diferensiasi fungsional dan perbedaan *code* diantara sistem. Masing-masing sistem memiliki fungsi yang berbeda. Kebijakan *social distancing* jelas menimbulkan implikasi krisis pada sistem ekonomi, sedangkan secara keseluruhan hampir banyak sistem bergantung kepada perputaran transaksi ekonomi. Sedangkan *code* pada masing-masing sistem tak dapat dipahami oleh sistem-sistem lain. Sistem kesehatan tentu tidak bisa 'menangkap' *code* untung vs rugi yang dimiliki sistem ekonomi, demikian pula sistem ekonomi mungkin tak sepenuhnya bisa menerima *code* dari sistem kesehatan.

Implikasi terhadap sistem ekonomi ini mendorong sistem politik mengeluarkan kebijakan baru untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat. Kebijakan berupa *New Normal* di tahun 2021 diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekonomi, dengan memberikan kelonggaran terhadap sejumlah sector perdagangan dan pariwisata. Ini adalah *code* sistem ekonomi, yaitu untung dan dan rugi. Jika sector pariwisata dan perdagangan ditutup total sector lain akan mengalami *chaos*. Dalam teori Luhmann ini disebut sebagai variasi dari berbagai pilihan, sebagai konsekuensi untuk mengatasi kesulitan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat, media sosial menjadi ajang perdebatan kebijakan pandemi dengan nuansa lebih politis.

Di sisi lain, sistem kesehatan sebagai sector yang bersentuhan langsung dengan pandemi mengalami kegoncangan di berbagai daerah, DKI Jakarta, Semarang, DIY, dan sebagainya. Hal ini terlihat dari semakin melonjaknya angka positif Covid di Indonesia hingga mencapai jumlah jutaan lebih kasus (Kemenkes, 2021). Kondisi ini diikuti dengan bertambahnya angka kematian tenaga kesehatan yang terpapar virus. Gubernur DKI Jakarta pada akhirnya

mengeluarkan statement bahwa dalam hitungan pekan, jika angka Covid masih bertambah maka seluruh rumah sakit di DKI Jakarta akan *collapse* (Mufarida, 2020).

Dalam hal ini, sistem internal kesehatan belum mampu merespon sistem ekonomi dan politik yang kebijakannya dianggap akan semakin memperbesar peluang meningkatnya angka positif Covid-19. Statement rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat *collapse* muncul berkaitan dengan ketidaksiapan sistem kesehatan Indonesia untuk merespon pandemi, baik itu dari ketersediaan alat, keterbatasan tenaga kesehatan, kapasitas ruangan, dan sebagainya. Kesemuanya ini berkaitan dengan sistem management internal dalam rumah sakit dan Kementerian Kesehatan yang semestinya 'lahir' dari proses *autopoiesis* sistem kesehatan.

Sistem kesehatan tidak mampu melampaui kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan *New Normal*, karena fungsinya yang terpatok pada pelayanan pasien. Sedangkan sistem ekonomi melalui pembukaan akses kunjungan ke tempat pariwisata dan pusat-pusat perbelanjaan juga hanya dapat bertindak sejauh masyarakat mematuhi protocol kesehatan saja, yang tentu saja ini tetap menyimpan risk yang besar pada peningkatan angka Covid-19.

Kebijakan penerapan protocol kesehatan hanya berlaku di ranah aturan dengan berbagai sanksi yang dipropagandakan pemerintah melalui berbagai sosial media, namun dapat kah itu menjamin masyarakat Indonesia akan berperilaku patuh? Penulis berargumen, bahwa sejauh sistem hanya berjalan berdasar aturan, berpeluang pada resiko kegagalan. Hal ini terlihat pada beberapa kasus di DIY, Surabaya, dan DKI Jakarta dalam menghadapi gelombang pesepeda di jalanan yang mayoritas tidak mematuhi protocol kesehatan. Surabaya terbukti melonjak kurva positif Covid-19 pasca kebijakan *New Normal*, demikian pula DIY dan DKI Jakarta.

Meaning, Jaringan Komunikasi dan Variasi Solusi

Risk kegagalan sistem dalam merespon pandemi juga bersumber pada proses komunikasi yang memunculkan kontingensi ganda. Komunikasi bagi Luhmann adalah elemen mendasar dari masyarakat. Ia membentuk *meaning* yang mustahil dalam proses komunikasi tersebut seseorang akan menerima makna yang sama persis dengan yang dimaksud oleh komunikator. Perbedaan *meaning* terhadap pandemi pada setiap sistem jelas memunculkan problematika kebijakan dan kompleksitas penanganan yang tidak kunjung menemukan jalan keluar. Bagi sistem kesehatan, pandemi harus diselesaikan dengan lockdown total pada semua sector, sedangkan sistem ekonomi merespon pandemi sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi masyarakat sehingga pilihan lockdown dan *social distancing* bukanlah pilihan tepat dari berbagai variasi solusi yang ada.

Pilihan terhadap berbagai variasi solusi, sebagaimana yang diteorikan oleh Luhmann, memang tidak selalu menunjukkan sebagai pilihan terbaik, karena bagi Luhmann kehidupan adalah proses evolusi sosial. Dalam proses evolusi sosial ini manusia tidak bisa menghindari keberadaan kontingensi ganda. Sehingga ketika terjadi perbedaan makna dan ketidakpastian maka sistem akan terus berproses melakukan autopoiesis sebagai bagian dari pertahanan diri. Demikian pula dalam pemilihan variasi solusi kebijakan pandemi antar sistem tentu akan sangat bergantung kepada bagaimana sistem tersebut dalam memaknai pandemi, sesuai dengan kepentingan sistem itu sendiri (*code*).

Dalam konteks sistem ekonomi, pengambilan kebijakan sebagai solusi dari variasi yang ada adalah rasional, meski demikian norma berupa penerapan protokol kesehatan menjadi patokan dalam mengatasi kontingensi ganda berkenaan dengan penekanan laju virus. Namun permasalahannya adalah, ketika

masyarakat yang terdiri dari *self-consciousness* individu-individu memaknai berbeda berkenaan dengan Covid-19 maka ini menjadi satu problem tambahan lagi. Masih banyak ditemukan perilaku masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan, sehingga banyak ditemukan kasus-kasus baru kemunculan positif Covid-19. Munculnya kasus-kasus baru ini berhadapan dengan sistem internal kesehatan Indonesia yang belum siap dari aspek management.

Mari kita lihat pada sistem masyarakat di level *grassroot*. Beberapa hari ketika kasus Covid-19 mulai merebak di Jakarta, banyak sistem politik di tingkat terkecil seperti RT dan RW menutup akses ke daerah mereka dengan berbagai cara. Poster, spanduk, tulisan bernuansa penolakan terhadap warga luar dan pendatang bermunculan. Namun, suasana seperti ini hanya dapat bertahan beberapa pekan, karena setelah itu, penjagaan portal tidak lagi seketat di awal pandemi. Bahkan, ketika angka Covid-19 menanjak hingga angka jutaan, masyarakat justru lebih banyak beraktivitas dan berinteraksi di luar.

Hal ini semakin menunjukkan bahwa respon masyarakat sebagai suatu sistem terhadap lingkungan yang mengancam sangat bergantung bagaimana mereka memaknai pandemi, terlebih jika kemudian dihadapkan pada realitas sumber perekonomian mereka dan kebutuhan refreshing di masa WFH. Pemaknaan ini dari waktu ke waktu juga menunjukkan adanya perubahan. Hal ini terlihat ketika Maret hingga pertengahan 2020 di awal pandemi masyarakat dan berbagai sistem lain seperti pendidikan dan ekonomi menutup rapat-rapat interaksi sosial. Namun, lambat laun di awal tahun 2021 masyarakat mulai melonggarkan sistem portal di masing-masing unit sistem sosial mereka, mengubah mode daring ke mode hybrid untuk sistem pendidikan, dan membuka perlahan-lahan sector pariwisata. Perubahan ini merupakan *feedback* dari kesadaran akan pemaknaan baru terhadap

lingkungan. Pada akhirnya akan tetap memunculkan *risk*, meskipun setiap sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan sistem pariwisata memiliki aturan protokol kesehatan sebagai subsistem management resiko tersebut.

Secara umum, penerapan teori sistem sosial Luhmann di atas telah menunjukkan justifikasi atas fenomena empiris yang terjadi pada masyarakat di masa pandemi. Justifikasi yang dimaksud disini adalah bahwa secara Sosiologis logika masyarakat dalam merespon Covid-19 di setiap sistem sosial yang ada dapat dimengerti, dan merupakan sebuah pola umum dari perkembangan masyarakat. Sifat autopoietic sistem sosial secara perlahan-lahan 'bekerja' untuk merespon pandemi dengan membentuk subsistem-subsistem yang bertugas untuk mengatasi dan mencegah Covid-19 dan efek-efek yang ditimbulkannya di masyarakat.

Melalui pendekatan sistem sosial ini pula dapat ditunjukkan bahwa ketidaksinkronan kebijakan dari masing-masing sistem sosial di Indonesia lebih disebabkan karena faktor perbedaan *code* dan *meaning* yang mereka serap. Sistem sosial kesehatan dan pendidikan menjadi yang terdepan dalam merespon pandemi secara cepat dan menutup berbagai peluang penyebaran melalui protocol kesehatan yang ketat dan *social distancing*. Hal ini dapat dipahami karena kedua sistem ini berhadapan langsung dengan pasien Covid dan sebagai sistem pendidikan yang memiliki tingkat penularan besar. Sehingga kedua sistem ini memaknai Covid-19 sebagai ancaman besar yang harus segera tertangani.

Sedangkan di sisi lain, sistem ekonomi termasuk pariwisata, tidak dapat bertahan lama dalam situasi pandemi, karena keduanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga kedua sistem ini memaknai Covid-19 secara berbeda dengan sistem kesehatan dan sistem pendidikan formal. Mereka memaknai Covid-19 sebagai

ancaman kehidupan ekonomi mereka, sehingga tidak ada cara lain bagi mereka selain tetap membuka sector tersebut di masa pandemi. Pilihan ini kemudian menjadi problem baru bagi sistem kesehatan yang manajemenya belum siap menampung banyaknya pasien Covid-19. Pada titik ini kita melihat adanya paradoks dalam setiap sistem, ada ketidaksinkronan antar institusi yang menjadi pemeran. Kompleksitas yang muncul karena perbedaan *meaning* ini, menghasilkan perbedaan *feedback*, subsistem yang dihasilkan dari hasil autopoiesis tersebut menjadi berbeda-beda fungsi dan menjadi saling kontradiktif, pada akhirnya akan memunculkan resiko-resiko yang memungkinkan sistem sosial tertentu dapat *collapse*.

Melalui uraian ini, kita juga dapat menemukan kelemahan Luhmann dalam memberikan argumen terhadap proses autopoiesis ini. Sehingga terkesan 'menerima begitu saja' kenyataan dan kompleksitas yang ada sebagai '*sunnatullah*' atau hukum alam dari suatu sistem sosial. Artikel ini tidak hendak mengarah kepada justifikasi secara penuh untuk 'menerima begitu saja' realitas kompleksitas tersebut, namun melalui pendekatan dari Luhmann bisa menjadi salah satu jalan untuk melakukan tindakan intervensi berupa rekomendasi variasi kebijakan jika ke depan menghadapi situasi yang sama.

Pertama, otoritas legal dan penuh dari pemerintah pusat sangat penting untuk menciptakan persamaan *meaning*. Melalui otoritas ini pemerintah pusat dapat mengatur dan memmanagement *feedback* dari masing-masing sistem sosial. Setidaknya, hal ini akan memunculkan *feedback* yang meskipun beragam antar sistem tetapi memiliki tujuan sama, yaitu menanggungi dan mencegah penyebaran virus Covid-19. Sebagai contoh, sistem yang paling mencolok bereaksi dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah kesehatan dan ekonomi. Ketika sistem kesehatan memberikan *feedback*

agar pemerintah mengatur mobilisasi masyarakat, tetapi sistem ekonomi tetap membuka akses fisik maka kebijakan pencegahan penyebaran virus Covid-19 tidak akan berhasil. Akibatnya, seperti yang kita lihat, sistem kesehatan *collapse* menangani jumlah pasien Covid, sedangkan di sisi lain sistem kesehatan di Indonesia belum cukup stabil untuk menghadapi pandemi.

Kedua, dari otoritas legal tersebut, pemerintah dapat melakukan sejumlah intervensi untuk menanggulangi resiko dari kebijakan terpusat tersebut. Pemerintah melalui subsistem-subsistem structural di bawahnya dapat memberikan stimulant material dan non-material. Jepang dapat menjadi salah satu contoh negara yang memberikan stimulant di masa awal pandemi. Kebijakan ini memungkinkan sistem ekonomi dapat bertahan ketika *physical distancing* dan lockdown menjadi feedback bersama di negara tersebut dalam menghadapi pandemi. Contoh lain adalah Korea Selatan, negara ini berhasil menekan laju persebaran Covid-19 hanya dalam 2 bulan dengan kebijakan intervensi kesehatan yang ketat. Pemerintah melalui sistem kesehatan bergerak di banyak titik mobilitas warga untuk melakukan tracing dengan rapid test. Ekonomi Korea Selatan tetap stabil karena laju persebaran Covid-19 dilaksanakan secara massif dan cepat.

Ketiga, problem kompleksitas berupa diferensiasi fungsional yang muncul pada berbagai sistem sosial di Indonesia akan dapat direduksi ketika apa yang menjadi kebijakan otoritas legal-formal menjadi patokan kebijakan semua subsistem. Oleh karenanya, penting bagi semua sector untuk dalam kurun waktu pandemi ini memiliki kesamaan *meaning* dalam penanganan pandemi. Sinergisitas antar institusi akan muncul secara sistemik.

Intervensi kebijakan berdasar pola pendekatan Sistem Sosial Luhmann ini menjadi penting mengingat tiap masyarakat memiliki pola tertentu. Sehingga memahami sistem secara komprehensif di tingkat mikro,

meso, dan makro menjadi kebutuhan agar kebijakan yang diterapkan efektif, tepat, dan cepat, khususnya dalam situasi pandemi. Pada sisi lain, hal ini juga untuk mengurangi kemungkinan ketimpangan kebijakan di beberapa sector penting yang bersentuhan langsung di masyarakat. Baik ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sama-sama merupakan sector penting dan mendasar bagi kehidupan manusia, sehingga bukanlah sebuah ketidakmungkinan untuk mereduksi diferensiasi fungsional yang kompleks di situasi pandemi.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan Sistem Sosial Luhmann merupakan salah satu cara diantara berbagai pendekatan Sosiologis lain untuk memahami kompleksitas masyarakat. Melalui pendekatan ini kita dapat memahami mengapa masyarakat Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk melalui masa pandemi dan mengapa kompleksitas tersebut muncul. Masyarakat sebagai entitas yang terdiri dari berbagai macam sistem dan subsistem bukanlah suatu realitas tunggal. Sehingga, pendekatan kebijakan yang diterapkan perlu melihat ke dalam realitas masyarakat itu sendiri. Hal ini penting dimengerti oleh para pengambil kebijakan di berbagai sector, karena diferensiasi fungsional pada sistem di masyarakat menghasilkan perbedaan *meaning* dan *feedback* yang jika dalam situasi pandemi tidak diintervensi dengan strategi yang tepat akan memperlambat proses perbaikan, dan bahkan bisa *collapse*. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat dan pengambil kebijakan untuk memahami dinamika dan kompleksitas sistem sosial dalam menghadapi pandemi gelombang ketiga ini. Jika intervensi kebijakan tepat, maka masyarakat tidak akan lagi membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk melalui masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(2), 2720–8958.
<https://doi.org/10.24014/pib.v1i2.9616>
- Amin, C., Priyono, P., Umrotun, U., Fatkhiyah, M., & Sufahani, S. F. (2021). Exploring the prevalence of protective measure adoption in mosques during the covid-19 pandemic in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(24).
<https://doi.org/10.3390/su132413927>
- Dede Yoshima Nekada, C., Aquino Erjinyuare Amigo, T., Deni Krisnanto, P., Respati Yogyakarta Program Studi Keperawatan, U., & Ilmu Kesehatan, F. (2020). *Keep Working in A State of Anxiety About Covid-19 Pandemic*. 158–165.
- Dharma Kusuma, F. S. (2021). *Rasionalitas Tradisi Nyadran Masa Pandemi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo*. 7(2).
- Fadhillah Rizqah, S., & Amelia, Ar. A. (2021). Hubungan Perilaku Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Untuk Memutus Rantai Penularan Covid-19 Di Kelurahan Bontoa Maros. *Original Research Open Access Journal of Muslim Community Health*, 2(3).
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–323.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>
- Guy, J. S. (2018). 'Niklas Luhmann before Relational Sociology: The Cybernetics Roots of Systems Theory.' *Systems Research and Behavioral Science*, 35(6), 856–868.
<https://doi.org/10.1002/sres.2523>
- Holmström, S. (2007). Niklas Luhmann: Contingency, risk, trust and reflection. *Public Relations Review*, 33(3), 255–262.
<https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2007.05.003>
- Lele, G. (2021). Concurrency as crisis decision-making governance: Lessons from Indonesia's response to the COVID-19 pandemic. *Regional and Federal Studies*.
<https://doi.org/10.1080/13597566.2021.1960513>
- Lesilolo, C. V. P. (2021). Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Berhubungan Dengan Kepatuhan Menggunakan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(3), 557–564.
- Leydesdorff, L. (2018). *The differentia specifica of Interhuman Communications: Luhmann and the Sociological Reflection of Information Theory* (Vol. 2). World Scientific.
- Li, X. (2017). Social System. *Series on Contemporary China*, 40, 253–280.
https://doi.org/10.1142/9789813206700_0009
- Luhmann, N. (2012). *Theory of Society Volume 1* (1st ed., Vol. 1). Stanford University Press.
- Maurer, K. (2010). Communication and Language in Niklas Luhmann's Systems-Theory. *Pandaemonium Germanicum (Online)*, 16, 1–21.
<https://doi.org/10.1590/s1982-88372010000200002>
- Nurchahyati, E. V., & Fauzi, A. M. (2021). Rasionalitas Masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Dalam Melaksanakan Yasinan di Masa Pandemi Covid-19. *Momentum: Jurnal Sosial Keagamaan*, 10(1), 29–40.
- Nurrahmi, F., Masykar, T., Harapan, H., & Masykar, T. (2021). Paradox of protective behaviours among Muslim men during the early stage of the COVID-19 pandemic in Aceh, Indonesia. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 1–20.
<https://doi.org/10.1017/dmp.2021.110>

- Peter Garlans Sina. (2020). Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Management (SME's)*, 12(2), 239–254.
- Purnamasari, D. M. (2020). *Atasi Corona, Jokowi Serahkan Kebijakan ke Pemda dan Ajak Masyarakat Bersatu*. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Atasi+Corona%2C+Jokowi+Serahkan+Kebijakan+ke+Pemda+dan+Ajak+Masyarakat+Bersatu++Artikel+ini+tayang+di+Kompas.com+dengan+judul+%22Atasi+Corona%2C+Jokowi+Serahkan+Kebijakan+ke+Pemda+dan+Ajak+Masyaraka>
- Prasetya, A., & Hidayat, D. (2020). Pengalaman Pekerja Informal di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Bandung. *Journal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, 2(2), 16–32.
- Riana, F. (2021). *Setahun Pandemi Covid-19, Ini Aneka Kebijakan Pemerintah dan Kritiknya*. <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya>
- Ridhoi, M. A. (2020). Anies dan Pemerintah Pusat Selisih Tangani Corona, Dampaknya ke Publik. <https://katadata.co.id/Muhammadridhoi/Berita/5eba5f3e7b54f/Anies-Dan-Pemerintah-Pusat-Selisih-Tangani-Corona-Dampaknya-Ke-Publik>
- Ritzer, G. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2011). The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists. In *The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1002/9781444396621>
- Seidl, D., & Schoeneborn, D. (2012). Niklas Luhmann's Autopoietic Theory of Organisations: Contributions, Limitations, and Future Prospects. *SSRN Electronic Journal*, 105. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1552847>
- Sumaryana, A., Toharudin, T., Caraka, R. E., Pontoh, R. S., Chen, R. C., & Pardamean, B. (2020). SHORT COMMUNICATION: COVID-19 Pandemic and Attitude of Citizens in Bandung City Indonesia (Case Study in Cibiru Subdistrict). In *International Journal of Criminology and Sociology* (Vol. 9).
- Thornhill, C. (2010). Niklas Luhmann and the sociology of the constitution. *Journal of Classical Sociology*, 10(4), 315–337. <https://doi.org/10.1177/1468795X10385181>
- Valentinov, V. (2014). The complexity-sustainability trade-off in Niklas Luhmann's social systems theory. *Systems Research and Behavioral Science*, 31(1), 14–22. <https://doi.org/10.1002/sres.2146>
- Valentinov, V. (2017). Wiener and Luhmann on feedback: from complexity to sustainability. *Kybernetes*, 46(3), 386–399. <https://doi.org/10.1108/K-11-2016-0317>
- Valentinov, V. (2019). The Ethics of Functional Differentiation: Reclaiming Morality in Niklas Luhmann's Social Systems Theory. *Journal of Business Ethics*, 155(1), 105–114. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3521-7>
- Wanodyatama Islami, N., Yuwanto, L., Sudiby, E., Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Jl Panji No, B., Malang, K., & Surabaya Jl Raya Kalirungkut Surabaya, U. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Tatanan Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>